

**AKUNTABILITAS ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI  
DAN KERJASAMA INVESTASI DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**Hera Ratnaningrum  
07011181722024**

**(Konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal)**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS ANGGARAN PROGRAM  
PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAM INVESTASI  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1**

**Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh :**

**HERA RATNANINGRUM  
07011181722024**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,**

**Februari 2022**

**Pembimbing 1**

**Dr. Hj. Nurmah Semil, M. Si.  
NIP. 196712011992032002**



**Pembimbing 2**

**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002**



## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

### AKUNTABILITAS ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA PALEMBANG

## SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Penguji  
Pada Tanggal 15 Maret 2022  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Hj. Nurmah Semil, M. Si.  
Ketua



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
Anggota



Drs. Gatot Budiarto, MS  
Anggota



Ermanovida, S. Sos., M. Si.  
Anggota



Dekan FISIP



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hera Ratnaningrum  
NIM : 07011181722024  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Fiskal  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“Akuntabilitas Anggaran Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang”**

Pembimbing:

Ketua : Dr. Hj. Nurmah Semil, M. Si.  
Anggota : Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
Tanggal Ujian : 15 Maret 2022

Adalah benar hasil kerja ilmiah sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya salah di kemudian hari, maka saya siap dicabut gelar keserjanaan.

Dengan hormat,

Palembang, 23 Mei 2022



Hera Ratnaningrum

NIM 07011181722024

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Jangan mudah menyerah . Kamu membuat tangga dengan pengalaman gagalmu. Kini tanggamu lah yang paling tinggi. Naiklah perlahan dan raih yang kamu inginkan.”*

(Baek Yi Jin, Twenty Five Twenty One)

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi Ini  
Saya Persembahkan Kepada:**

1. Kedua Orang Tua Saya dan Dua Ssaudara Tercinta
2. Keluarga dan Sahabat-Sahabatku
3. Rekan Seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik 2017
4. Almamater Kebanggaan

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas anggaran program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang tahun 2020 berdasarkan indikator akuntabilitas keuangan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang dikutip melalui modul Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2000) yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketertiban peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang diolah menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, observasi, dan wawancara langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas anggaran program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang tahun 2020 cukup akuntabel. Hal ini dilihat berdasarkan pelaksanaan integritas keuangan yang akuntabel, pelaksanaan pengungkapan yang cukup akuntabel, dan pelaksanaan ketertiban terhadap peraturan perundang-undangan yang akuntabel. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang tahun 2020 harus memperbaiki beberapa hal, yaitu melakukan *update* mengenai dokumen laporan kinerja terbaru di website resmi, dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan agar selalu menyimpan dokumen-dokumen laporan keuangan yang sah berupa scan atau fotokopi sebagai arsip.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Keuangan, Anggaran, Integritas, Pengungkapan, Ketertiban

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nurmah Semil, M. Si.  
NIP. 196712011992032002

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

Palembang,                      Maret 2022  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121

## **ABSTRACT**

*The research aims is to analyze the accountability implementation of investment promotion and cooperation improvement program budget of Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang for 2020 based on financial accountability indicator from Lembaga Administrasi Negara (LAN) quoted from the module of Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2000) that consist of financial integrity, disclosure, the discipline of laws and regulation. The method that used for the research are qualitative method that processed by descriptive analysis. The data was obtained through documentation, observation, and interview directly at the research place. The result of research revealed that the accountability implementation of investment promotion and cooperation improvement program budget for 2020 is accountable enough. It revealed base on the implementation of financial integrity is accountable, the implementation of disclosure is accountable enough, the implementation of laws and regulation is accountable. The research result also revealed that Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang tahun 2020 have to improve some things which is updating the official website for the newest performance report information, increasing the activity effectiveness, and keep the financial report document always ready on the site such as scanned document or the photocopy one then saved as archive.*

**Keywords:** *Financial Accountability, Budget, Integrity, Disclosure, Discipline*

**Advisor I,**



**Dr. Hj. Nurmah Semil, M. Si.**  
NIP. 196712011992032002

**Advisor II,**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

**Palembang,                      Maret 2022**  
**Chairman of The Department of Public Administration**  
**Faculty of Social and Politic Science**  
**Sriwijaya University**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Akuntabilitas Anggaran Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang. Skripsi ini dibuat sebagai rangkaian akhir pembelajaran sekaligus sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Selama penyelesaian skripsi, penulis menyadari menerima banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penuh rasa syukur dari penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Heri Siswoyo dan ibunda Wiwik Piliwantiningsih yang telah memberikan cinta dan dukungan material dan moril yang tak pernah putus, serta doa-doanya yang tak terputus slam aini.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
4. Ibu Dr. Hj. Nurmah Semil, M. Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Zailani Surya Marpaung, S. Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus serta selalu sabar dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama bangku perkuliahan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi dan bagi penulis pribadi ke depannya.
6. Bapak Eddy Airlangga, S. STP., M. Si yang telah memberikan izin penelitian di dinas yang beliau pimpin serta seluruh pegawai yang telah memberi kemudahan dalam proses pengumpulan data.
7. Teman seperjuangan, Tim Sukses Sarjana, Kharisma, Kintan Virinda, Justin Nurrahma, dan M. Lutfi Baidowi, yang telah memberikan banyak dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2017, semoga kesuksesan serta keberhasilan menghampiri kita semua.
9. Seluruh pegawai dan pihak yang ikut andil dalam membantu selama proses penulisan skripsi ini.
10. Saya sendiri sebagai penulis yang telah yakin dan percaya bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala hambatan mental dan fisik.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan. Penulis juga sangat terbuka dengan berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga seluruh bantuan mendapat berkah dan balasan dari Allah SWT.

Palembang, Februari 2022  
Penulis,

Hera Ratnaningrum



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Landasan Teori .....	8
1. Keuangan Negara.....	8
2. Akuntabilitas.....	9
3. Akuntabilitas Keuanagan.....	13
4. Anggaran .....	18
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	21
C. Kerangka Pemikiran .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	27
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Definisi Konsep .....	27
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Informan Penelitian .....	31
G. Teknik Analisis Data .....	31
H. Lokasi Penelitian .....	32
I. Sistematika Penulisan .....	33

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Hasil Penelitian Akuntabilitas Anggaran Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang .....	34
C. Hasil dan Pembahasan .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	34
<b>LAMPIRAN</b> .....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun 2019 - 2020 .....	5
Tabel 2.1 Laporan Realisasi Program Peningkatan Promosi dan.....	20
Kerjasama Investasi Tahun 2020.....	20
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	<b>28</b>
Tabel 4.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang menurut Golongan Per 30 Desember 2020.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
Tabel 4.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang menurut Jabatan Per 30 Desember 2020 .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4.3 Kinerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah per Agustus 2020 .....	40
Tabel 4.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tahun 2020.....	40
Tabel 4.5 Rekapitulasi Realisasi Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi tahun 2020 .....	47
Tabel 4.6 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan Jenis Belanja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang tahun 2020 .....	51
Tabel 4.7 Jurnal Umum - Balik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang tahun 2020.....	54
Tabel 4.8 Jurnal Umum - Penyesuaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang tahun 2020 .....	58
Tabel 4.9 Matriks Hasil Penelitian Akuntabilitas Anggaran Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang tahun 2020.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4.2 Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang per 30 Desember 2020 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4.3 Halaman Depan Website Resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.....	36
Gambar 4.4 Halaman Dokumen Perencanaan Website Resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang .....	37
Gambar 4.5 Website Resmi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Elektronik) Kota Palembang tahun 2020.....	38
Gambar 4.6 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan, Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal tahun 2020 .....	44
Gambar 4.7 Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi tahun 2020 .....	45
Gambar 4.8 Neraca Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang tahun 2020 .....	52
Gambar 4.9 Aplikasi SIMDA Keuangan di komputer salah satu pegawai bidang keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.....	62
Gambar 4.10 <i>Print Out</i> Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang tahun 2020 .....	63
Gambar 4.11 <i>Print Out</i> Kwitansi Belanja Sewa Dekorasi Program Peningkatan Promosi Kerjasama dan Investasi tahun 2020 .....	67
Gambar 4.12 <i>Print Out</i> Kwitansi Belanja Sewa Tempat Program Peningkatan Promosi kerjasama dan Investasi tahun 2020.....	68

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara global, berbagai negara di dunia bersaing menciptakan kondisi perekonomian yang terbaik agar dapat memenuhi kesejahteraan penduduk di negaranya. Namun, seiring perkembangan zaman, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa asal dilakukan. Seperti dilansir oleh *World Bank* (2016) bahwa tahun 1970 saja rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,36% dan mampu menghidupi 3,76 miliar penduduk dunia. Namun, pertumbuhan ekonomi yang masif masih dapat menimbulkan masalah jika pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan dampak di masa depan, seperti masalah lingkungan dan kesenjangan sosial. Seperti yang dijelaskan Armida, Endah (2016) Perilaku manusia dan kegiatan ekonomi juga telah menghasilkan emisi yang terus meningkat di berbagai negara. Kondisi seperti ini mengakibatkan banyaknya penyakit, bahkan kematian.

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan menjadi jawaban kekhawatiran akan isu pembangunan yang berdampak buruk untuk masa depan. Melalui konsep Tujuan pembangunan berkelanjutan diharapkan pembangunan dapat menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan (<http://sdgs.bappenas.go.id/>). Melalui tujuan nomor 8 (delapan) yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, diharapkan dapat menjadi komitmen bagi 193 negara agar dapat melaksanakan segala bentuk usaha pertumbuhan ekonomi negara dapat memberi dampak yang berkepanjangan tanpa efek buruk kepada generasi yang akan datang.

Demi melancarkan pertumbuhan perekonomian yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDG's)*, pemerintah harus dapat melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan baik agar kegiatan

perekonomian yang efektif dapat dilaksanakan tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, berdasarkan laporan *Global Sustainable Development Report 2019*, pelaksanaan target tahun 2030 tujuan pembangunan dianggap belum terlaksana dengan baik karena belum optimalnya relevansi antara perencanaan dan penggunaan anggaran dengan sasaran yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, penting bagi penyelenggara negara memberi perhatian pada pengelolaan keuangan yang baik dalam menjalankan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* dalam melaksanakan berbagai pembangunan tak luput untuk pertumbuhan perekonomian negara.

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut berkomitmen dalam menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan, telah mengambil langkah serius agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dalam menerapkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pentingnya pengelolaan keuangan yang baik semakin menjadi perhatian masyarakat saat awal reformasi hingga sekarang terutama dalam hal pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Salah satu cara pemerintah agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut adalah dengan mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di setiap pembangunan yang dilaksanakan.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Ihyaul Ulum, 2010:40). Pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, harus memaknai akuntabilitas sebagai salah satu cara untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Seperti yang dijelaskan dalam kajian akuntabilitas oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (2017) bahwa pemerintah memaknai akuntabilitas melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menegaskan akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sama halnya dengan penjelasan mengenai akuntabilitas finansial oleh Carino (2009) dalam Mahmudi (2007:9-11) bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Maka, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan akuntabilitas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam pembangunan untuk memenuhi kesejahteraan sosial yang tepat guna dan bebas tindakan kecurangan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi membutuhkan dukungan investasi yang menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2000:137-138) investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru. Indonesia sebagai negara yang besar, tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk membuka peluang investasi dalam membangun perekonomian. Menurut laporan Bank Dunia, Indonesia masuk peringkat ke – 72 dari 190 negara berdasarkan kategori kemudahan berusaha atau *Erase of Doing Business (EoDB)*. Bahkan pada kurtal I 2019, realisasi investasi Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5,31% dibandingkan tahun 2018. Hal tersebut menandakan, bahwa pemerintah Indonesia berusaha mengambil langkah serius dalam memaksimalkan potensi investasi baik nasional maupun internasional.

Tahun 2020, menjadi tahun yang membuat perekonomian di berbagai negara menghadapi banyak tantangan dan ancaman akan keterpurukan perekonomian akibat pandemi *Covid-19* termasuk Indonesia. Dilansir dari Badan Koordinasi Penanaman modal,

triwulan I tahun 2020, Indonesia hanya mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 2,97% dan realisasi investasi triwulan II tahun 2020 diprediksi akan mengalami penurunan. Saat ini, secara kumulatif sampai akhir tahun 2020, realisasi investasi secara nasional telah berhasil melewati segala ancaman keterpurukan investasi di Indonesia karena telah mampu mencapai bahkan melebihi target investasi yaitu tercapai 101,1% dengan target Rp 817,2 triliun berhasil mencapai Rp 826,3 triliun.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang sebagai bagian dari pemerintah yang memberikan pelayanan terhadap kegiatan investasi di berbagai daerah di Kota Palembang, dituntut agar dapat menarik investor lokal dan internasional agar dapat meningkatkan kerjasama investasi di Kota Palembang. Salah satu program yang dilaksanakan untuk mewujudkan kerjasama investasi di Kota Palembang adalah program peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang memiliki kegiatan yaitu peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah, pengembangan potensi unggulan daerah, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, dan penyelenggaraan pameran investasi.

Termasuk saat pandemi *Covid 19* sepanjang tahun 2020, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang mampu bertahan untuk mencapai target investasi daerah bahkan terdapat peningkatan pencapaian target juga dibanding tahun sebelumnya. Selain itu juga, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang melakukan banyak pengurangan kegiatan pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, yaitu peningkatan koordinasi kerjasama di bidang penanaman modal dan instansi pemerintah dan dunia usaha,



peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah, peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Melalui tabel rekapitulasi target dan realisasi investasi, berikut penjelasan kinerja program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang tahun 2019 – 2020:

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang Tahun 2019 - 2020**

Tahun	Target investasi (%)	Realisasi investasi (%)	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)
2020	100% / 120 perusahaan skala nasional	179,16% / 215 perusahaan skala nasional	Rp 223.375.000	Rp 193.281.000	86,52%
2019	100% / 110 perusahaan skala nasional	131% / 145 perusahaan skala nasional	Rp 4.804.985.000	Rp 1.688.178.294	35,13%

*Sumber: Diadaptasi dari Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Palembang 2019 dan 2020*

Berdasarkan tabel 1.1, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi tahun 2020 memiliki anggaran sejumlah anggaran sejumlah Rp 223.375.000 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp 193.281.000 atau anggaran terserap 86,52% yang menandakan anggaran terserap cukup efektif dengan pencapaian investasi 179,16% atau 215 perusahaan skala nasional dari yang ditargetkan yaitu 120 perusahaan skala nasional. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi tahun 2019 memiliki anggaran sejumlah Rp 4.804.985.000 dengan realisasi anggaran sejumlah Rp 1.688.178.294 atau anggaran terserap 35,13% yang menandakan pelaksanaan anggaran tidak efektif dengan pencapaian investasi 131% atau 145 perusahaan skala nasional dari yang ditargetkan yaitu 110 perusahaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam kondisi pandemi *covid-19* pada tahun 2020 akan terancamnya pertumbuhan kerjasama investasi daerah dan mengharuskan instansi daerah banyak melakukan efisiensi anggaran, namun pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran mampu mengalami peningkatan pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi tahun 2020 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, penulis akan menganalisis bagaimana pelaksanaan akuntabilitas keuangan pada anggaran program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan penelitian ini, yaitu:  
Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas anggaran program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang tahun 2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusaan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai pada penulisan ilmiah ini yaitu:

Untuk mengetahui pelaksanaan akuntabilitas anggaran program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang tahun 2020.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan melalui penulisan ilmiah ini, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan kontribusi bagi ilmu keuangan negara terutama dalam konteks akuntabilitas keuangan serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (DPM-PTSP) Kota Palembang dalam hal akuntabilitas keuangan serta dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

- c. Aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat terus mempertahankan mekanisme pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan pedoman yang berlaku secara konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana Armida, Endah Murningtiyas. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target, dan Strategi Implementasi. Cet-2*. Bandung: Unpad Press.
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aridtanti, Nimas Des. 2021. Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia. [online]. <https://koinworks.com/blog/pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi/> 22 Oktober 2021
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). [online]. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp> 10 Desember 2021.
- Biswan, Rossari, Alhadi. 2018. Suatu Upaya Meningkatkan Kualitas Penganggaran Instansi Pemerintah. *Jurnal Indo Artha, No.1*, 1-10.
- Devas, Nick.al.1989.(Peny.).Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit UI Press
- Egbide, C. B dan Godwyns A. Agbude. 2012. *Good Budgeting and Good Governance: A Comparative Discourse. The Public Administration and Social Policies Review. IV Year, No. 2 (9): 55*.
- Halim, Abdul. 2001. Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hardiningsih, Pancawati, 2010, Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan, Kajian Akuntansi, Februari 2010, Hal: 61 - 76 Vol. 2 No. 1 ISSN : 1979-4886
- Ibrahim. 2014. Perencanaan dan Penganggaran. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol.15 No. 01*, 98-111.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.
- Istiantoro, I., Parminto A., & Ramadhani H. (2017). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan Perusahaan pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI. *Akuntabel*, 14(2), 157-179.
- Kementrian Invevtasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2021. Realisasi Investasi di Indonesia. [online]. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/68601> 22 Oktober 2021.Lawi, Gloria Fransisca Kathrina. 2019. SDGs Belum Optimal Akibat Perencanaan Belum Tepat Sasaran. [Online]. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191119/9/1172072/sdgs-belum-optimal-akibat-perencanaan-belum-tepat-sasaran->
- Ledvina V. Carino, 2009. *Akuntabilitas Administrasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lembaga Akuntabilitas Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul 1 dari 5 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. [online]. <http://kms.ipb.ac.id/1715/1/Akuntabilitas%20dan%20Good%20Governance%20C%20Modul%201%20dari%205%20Modul%20Sosialisasi%20Sistem%20Akuntabilitas%20Kinerja%20Instansi%20Pemerintah%20%28AKIP%29.pdf> (diakses pada 22 Oktober 2021).
- Loina Lalolo Krina P. 2005. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi.2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Terbuka: Banten.

- Mustami, Adinda Ade. 2017. Kualitas Anggaran Daerah Rendah. [online].. <https://nasional.kontan.co.id/news/kualitas-anggaran-daerah-rendah> (diakses pada 30 Februari 2021)
- Nurkholis, Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Cetakan I. UB Press: Malang.
- Purnomo, Bungkus Sasongko. 2021. *Manajemen Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Riadi, Muchlisin. 2020. *Value for money (Pengertian, Manfaat, Indikator, dan Pengukuran)*. [online]. <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/value-for-money.html> (diakses pada 20 Maret 2021)
- Rusli, Zaili, Adianto, Dadang Mashur. 2020. *Pembangunan Berkelanjutan: dalam Bingkai Otonomi Daerah*. Taman Karya: Pekanbaru.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (eds.). 1995. Metode penelitian survai. Jakarta: LP3ES.
- Solihin, Dadang. 2007. *Penerapan Good Governance di Sector Public untuk Meningkatkan Kinerja Lembaga Publik*. [online]. <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/penerapan-good-governancedi-sektor-publik-untuk-meningkatkan-akuntabilitas-kinerja-lembaga-publik> (diakses pada 16 Oktober 2021)
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-26. Alfabeta: Bandung.

- Sulaiman, Alfin. 2011. *Keuangan Negara pada BUMN dalam perspektif Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni
- Sutikno, dkk. 2011. *Laporan Akhir: Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Direktorat Otonomi Daerah, BAPPENAS: Jakarta.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi dan Perekayasaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE. Yogyakarta
- Tjandra, Riawan. 2009. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo: Jakarta.
- Todaro, P. M. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ulum, Ihyaul, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Walujo, Koesdijati, Utomo. 2020. *Pengendalian Kualitas*. Scopindo. Media Pustaka: Surabaya.
- World Bank. 2016. *World Development Indicators*. [online]. [www.databank.worldbank.org](http://www.databank.worldbank.org). (diakses pada 16 Oktober 2021).
- Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Palembang. E-SAKIP Kota Palembang: LAKIP 2020 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. [online] <https://esakip.palembang.go.id/1923/dokumen/126/2020/f7c09170f047dc9bb02d172bd94c231a.pdf> (diakses pada 21 November 2021)